

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelompok. Sinergi yang kuat dan tepat sasaran antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri diperlukan untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan inisiatif kelompok yang dilakukan oleh masyarakat. Pembuatan, pemilihan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan mediasinya, adalah tanggung jawab utama pemerintah. Perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab swasta. Masyarakat mengambil bagian dalam proses pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian (Teguh 2004, 97-99).

Pemerintah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, antara lain, program bantuan beras bagi masyarakat kurang mampu memberikan bantuan beras kepada mereka yang membutuhkan, meskipun hal ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Ini hanyalah langkah operasional cepat untuk memastikan bahwa beberapa kebutuhan mendasar dari mereka yang kurang beruntung terpenuhi.

Inisiatif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan gagasan yang dapat memperkuat komunitas kecil dengan meningkatkan kualitas hidup. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dilaksanakan langsung di masyarakat di bawah arahan pemerintah dan sesuai dengan kegiatan pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan usaha

keterampilan. Dengan memaksimalkan potensi yang ada, inisiatif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Cara hidup masyarakat saat ini harus diperhatikan oleh program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuannya adalah untuk memperkuat kemampuan anggota bisnis untuk bekerja dalam kelompok, kemampuan mereka untuk mendapatkan uang, kemampuan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka, dan pengetahuan mereka tentang masalah sosial dan rasa kebersamaan mereka (Hermawati 2006, 7).

Melalui pemberdayaan masyarakat, diperlukan inisiatif pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka mengembangkan kekuatan dan kapasitas yang ada dalam diri individu dan kelompok masyarakat agar mampu melakukan perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat merupakan proses belajar mengajar yang merupakan upaya yang berkesinambungan, terorganisir, dan metodis (Onny S Prijono & A.M.W Pranarka , 1996: 72).

Inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan sehingga masyarakat dapat berfungsi lebih efektif. Setiap usaha yang bertujuan untuk memajukan pembangunan harus menyertakan modal manusia. Manusia berperan baik sebagai target pembangunan maupun sebagai pemain.

Pemberdayaan dan pembangunan saling terkait. Orang-orang yang diberdayakan lebih mandiri dan menggunakan kreativitas mereka untuk menemukan solusi atas masalah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup harus ditingkatkan agar orang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diperlukan untuk mengatasi masalah mereka. Cara tercepat dan paling efisien untuk memberdayakan masyarakat untuk memerangi masalah kemiskinan dan memajukan pembangunan nasional 264 (Sudjana, 2004).

Badan Pusat Statistik Indonesia (2021) melaporkan bahwa 8,75 juta orang menganggur di Indonesia pada bulan Februari tahun itu. Dibandingkan dengan 6,93 juta orang yang hidup saat ini tahun lalu, jumlah ini naik 26,26%. Meski ada 9,77 juta penganggur pada Agustus 2020, namun tingkat pengangguran turun menjadi 10,44%.

Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik menjadi 6,26% pada Februari 2021. TPT tumbuh 1,32% poin dibandingkan Februari 2020 sebesar 4,99%. Namun jika dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar 7,07%, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,81% poin. Wilayah perkotaan memiliki TPT tertinggi pada Februari 2021, mencapai 8%. Sedangkan TPT sebesar 4,11% di pedesaan.

Tabel 1.1
Keadaan Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja
Per Februari 2020-Februari 2021

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021	Perubahan Feb 2020-Feb 2021		Perubahan Ags 2020-Feb 2021	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	202,60	203,97	205,36	2,76	1,36	1,39	0,68
Angkatan Kerja	140,22	138,22	139,81	-0,41	-0,29	1,59	1,15
Bekerja	133,29	128,45	131,06	-2,23	-1,67	2,61	2,03
Pengangguran	6,93	9,77	8,75	1,82	26,26	-1,02	-10,44
Bukan Angkatan Kerja	62,38	65,75	65,55	3,17	5,08	-0,20	-0,30
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,94	7,07	6,26	1,32		-0,81	
Perkotaan	6,12	8,98	8,00	1,88		-0,98	
Perdesaan	3,49	4,71	4,11	0,62		-0,60	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,21	67,77	68,08	-1,13		0,31	
Laki-Laki	83,94	82,41	82,14	-1,80		-0,27	
Perempuan	54,48	53,13	54,03	-0,45		0,90	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021.

Sebanyak 370,47 ribu orang di Kalbar hidup dalam kemiskinan hingga September 2019. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, lebih sedikit 7,9 ribu orang yang miskin. Dibandingkan dengan angka September dari tahun sebelumnya, yakni 740 lebih sedikit orang sekarang memenuhi syarat sebagai orang miskin. Antara September 2018 dan September 2019, terdapat 2.920 lebih banyak orang miskin yang tinggal di perkotaan daripada di pedesaan, selisih 2.180 orang. Kemiskinan perkotaan meningkat dari 4,58 menjadi 4,60 persen dari populasi. Sebaliknya, meningkat dari 8,84 persen menjadi 9,05 persen di pedesaan. (Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2019).

Tabel 1.2
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2018-
September 2019**

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
September 2018	79,360	4.58
Maret 2019	81,640	4.60
September 2019	82,280	4.61
Perdesaan		
September 2018	290,370	8.84
Maret 2019	296,770	9.05
September 2019	288,190	8.73
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	369,730	7.37
Maret 2019	378,410	7.49
September 2019	370,470	7.28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2019.

Untuk memerangi kemiskinan, banyak upaya telah dilakukan di sektor publik dan komersial serta kampanye kesadaran masyarakat. Melalui Kelompok Usaha Bersama, pemerintah menjalankan salah satu inisiatif penanggulangan kemiskinan (KUBE). Masyarakat dapat mengambil manfaat dari dan terlibat dalam KUBE, sebuah proyek yang dilakukan secara kelompok untuk mengatasi masalah kemiskinan yang telah mengakar dalam masyarakat dan dimodifikasi pengetahuan mereka dan didukung oleh kondisi lingkungan. KUBE merupakan wadah pemberdayaan sosial dengan misi menciptakan kegiatan sosial ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya (Andi, 2016:115).

Dengan inisiatif yang membantu masyarakat memperoleh keterampilan penting, inisiatif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk keluarga berpenghasilan rendah di daerah tersebut berupaya untuk melayani masyarakat. Salah satu inisiatif pemberdayaan yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan saat ini di Kota Pontianak adalah Kelompok Usaha Bersama.

Memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu yang harus berhasil, merupakan salah satu tujuan inisiatif Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun, masih terdapat tantangan yang menyulitkan pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Masalah terbesar adalah bahwa pemerintah daerah tidak menunjukkan dukungan yang cukup untuk itu. Menurut data dinas sosial kota Pontianak terdapat 30 kelompok usaha bersama yang terdapat di Pontianak.

KUBE Angrek 6 adalah salah satu kelompok yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara yang memiliki anggota kelompok yang beranggotakan ibu rumah tangga. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2020, dimana mereka berfokus pada pengelolaan pertanian sebagai bentuk usaha mereka untuk menghasilkan pendapatan.

Sebagai tindak lanjut dari Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2FM) atau program pengembangan KUBE ini, Kementerian Sosial mengeluarkan program Bantuan Pemberdayaan Sosial Langsung (BLPS), dimana program ini ditujukan untuk menumbuhkan KUBE yang telah dibentuk atau diberdayakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelompok Usaha Bersama yang telah diberdayakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (P2FM) berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan tunai sebesar Rp. 20.000.000 yang disalurkan melalui perbankan dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini.

Peneliti tertarik menggunakan judul “Strategi Pemberdayaan Program KUBE 6 Anggrek Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak” mengingat gambaran permasalahan kemiskinan dan keberadaan Program Bersama Usaha (KUBE) di atas.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. *Trend* kemiskinan perkotaan yang masih menjadi permasalahan pemerintah.
2. Adanya keterbatasan *skill* dan akses permodalan.
3. Adanya perbedaan pola pikir dalam internal kelompok usaha bersama.
4. Kurang optimalnya pendampingan terhadap kelompok usaha bersama.

1.3.Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan penelitian yang terlalu luas maka fokus penelitian ini akan membahas mengenai strategi pemberdayaan program kelompok usaha bersama (KUBE) Anggrek 6 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dengan

pendekatan deskriptif kualitatif yang menelaah kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah “Bagaimanakah strategi pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama Anggrek 6 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak?”

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Menelaah pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan program Kelompok Usaha Bersama Anggrek 6 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur pendorong dan penghambat program kelompok usaha bersama Anggrek 6 di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta kontribusi untuk memperkaya kajian tentang pengembangan Ilmu Pembangunan Sosial khususnya dalam memahami tentang Kebijakan Sosial dan Pembangunan serta dalam memahami tentang Masalah Sosial dan Pembangunan. Serta dapat dijadikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.6.2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan kajian untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang program Kelompok Usaha Bersama, yang mana nantinya akan menjadi bahan bacaan untuk mengikuti program pemberdayaan ini.

b) Bagi Pemerintah Setempat

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan mentoring, evaluasi, serta pelaksanaan program untuk agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.